

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI JAWA TENGAH
(SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19)**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



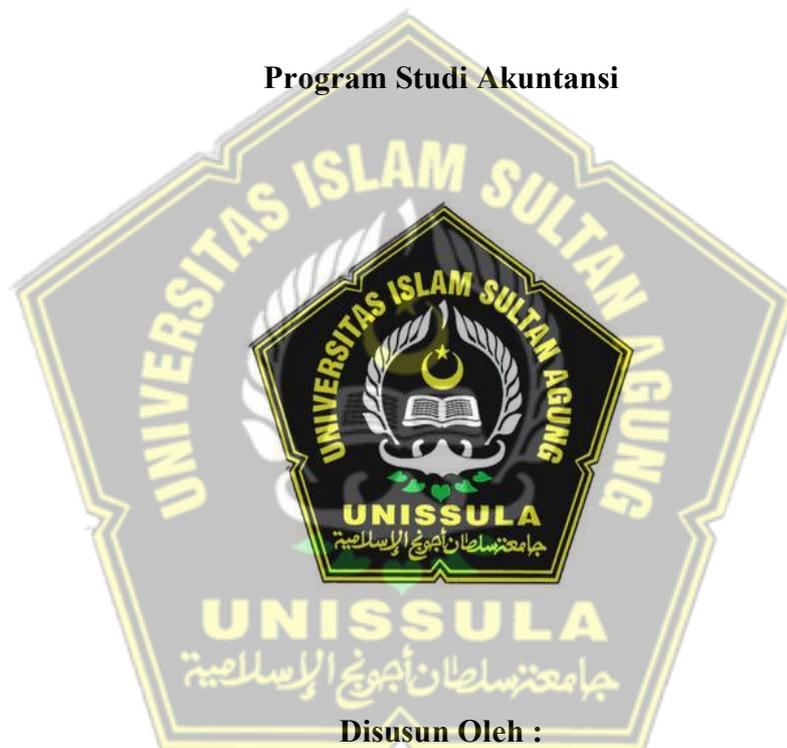
Disusun Oleh :
Kiki Clarissa Widyawati
Nim : 31402300140

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI JAWA TENGAH
(SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19)**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Kiki Clarissa Widyawati

Nim : 31402300140

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

SKRIPSI

PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH (SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19)

Disusun Oleh :

Kiki Clarissa Widyawati

NIM : 31402300140

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 November 2024

Pembimbing,


Prof. Dr. Edy Supriyanto, S.E., M.Si., Akt.

NIK. 211406018

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI JAWA TENGAH
(SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19)**

Disusun Oleh :
Kiki Clarissa Widyawati
NIM : 31402300140

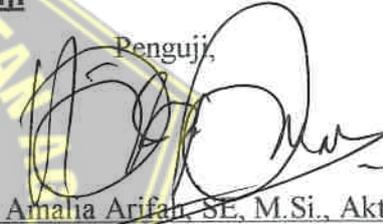
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 29 November 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,

Penguji,


Prof. Dr. Edy Supriyanto, S.E., M.Si., Akt.
NIK 211406018


Dr. Dista Amalia Arifan, SE, M.Si., Akt., CA
NIK 211406020

Penguji 2


Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA
NIK 210493034

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal 29 November 2024

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi


Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP. PhD
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Clarissa Widyawati
NIM : 31402300140
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian Skripsi saya dengan judul :

**“Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah di Jawa Tengah (Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19)”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan,



Kiki Clarissa Widyawati
NIM. 31402300140

**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH
(SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19)**

ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah periode sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Teknik analisis yang digunakan ialah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. serta dilakukan pula uji t berpasangan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pajak, retribusi, dan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, tidak terdapat perbedaan signifikan yang terjadi terhadap pajak dan retribusi daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Namun, diketahui terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah guna memaksimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pandemi Covid-19.

THE EFFECT OF LOCAL TAXES AND LEVIES ON FINANCIAL PERFORMANCE IN LOCAL GOVERNMENT OF CENTRAL JAVA (BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC)

ABSTRACT

This study is expected to examine the effect of local taxes and levies on financial performance in local government of Central Java, before and during the Covid-19 pandemic. Financial performance in local government measured based on local government financial independence ratio. Data collection is conducted using secondary data obtained from local government financial reports.

The analysis technique used is multiple linear regression to determine the effect of local taxes and levies on the financial performance of local governments. And also used paired sample t test to determine significant difference in local taxes, levies, and financial performance of local government before and during Covid-19 pandemic.

The study results indicate that local taxes have a positive significant effect on financial performance in local government, whereas local levies have a negative significant effect on financial performance in local government. There is no significant difference in local taxes and levies before and during Covid-19 pandemic. Whereas, there is significant difference in financial performance of local government before and during Covid-19 pandemic.

This study is expected to have contribute to local governments in increasing local taxes and levies to maximize financial performance in local government.

Keyword: *Local Taxes, Local Levies, Financial Performance in Local Government, Covid-19 Pandemic.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik dan tepat waktu yang berjudul **“Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah (Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19).**

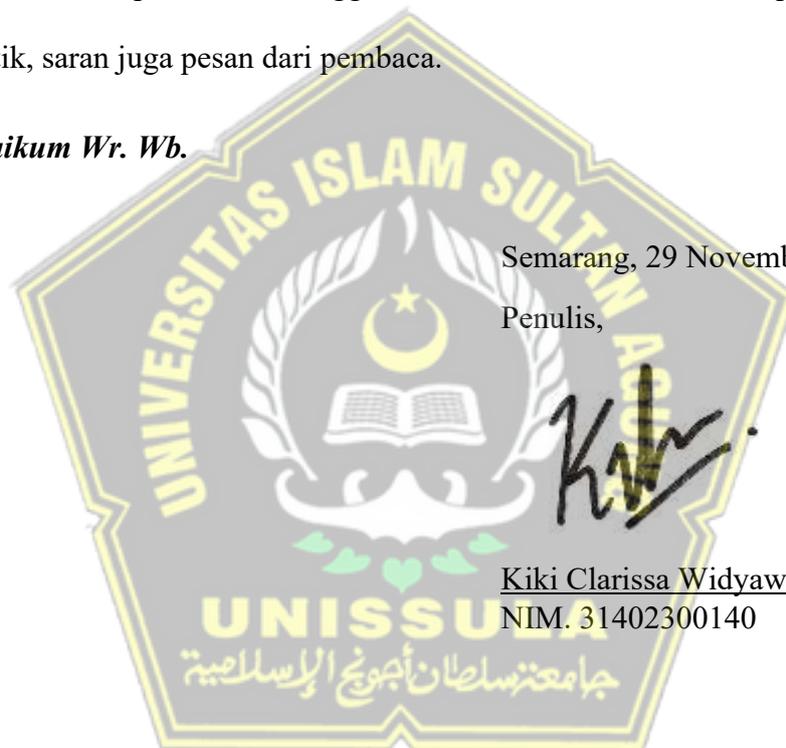
Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hambanya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung
4. Bapak Dr. Edi Supriyanto, SE., Akt., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan usulan penelitian Skripsi ini.

1. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
2. Kepada Bapak Setiawan Hernanto dan Ibu Eni Indrati selaku orangtua saya serta adik saya yang telah memberikan doa, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 29 November 2024

Penulis,

Kiki Clarissa Widyawati

NIM. 31402300140

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2 RUMUSAN MASALAH..... | 5 |
| 1.3 TUJUAN PENELITIAN..... | 5 |
| 1.4 MANFAAT PENELITIAN..... | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 LANDASAN TEORI..... | 8 |
| 2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)..... | 8 |
| 2.2 VARIABEL PENELITIAN | 9 |
| 2.2.1 Kinerja Keuangan..... | 9 |
| 2.2.2 Pajak Daerah..... | 11 |
| 2.2.3 Retribusi Daerah..... | 12 |
| 2.3 PENELITIAN TERDAHULU | 14 |
| 2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS | 18 |

| | | |
|--|--|----|
| 2.4.1 | Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 18 |
| 2.4.2 | Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 19 |
| 2.4.3 | Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 | 20 |
| 2.4.4 | Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 | 21 |
| 2.4.5 | Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 | 22 |
| 2.5 | KERANGKA PENELITIAN | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 25 |
| 3.1 | JENIS PENELITIAN | 25 |
| 3.2 | POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN | 25 |
| 3.2.1 | Populasi Penelitian | 25 |
| 3.2.2 | Sampel Penelitian | 26 |
| 3.3 | SUMBER DAN JENIS DATA | 26 |
| 3.4 | METODE PENGUMPULAN DATA | 27 |
| 3.5 | DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR | 27 |
| 3.5.1 | Variabel Independen | 27 |
| 3.5.2 | Variabel Dependen | 28 |
| 3.6 | METODE ANALISIS DATA | 29 |
| 3.6.1 | Analisis Statistik Deskriptif | 29 |
| 3.6.2 | Uji Asumsi Klasik | 29 |
| 3.6.3 | Analisis Regresi Linear Berganda | 30 |
| 3.6.4 | Uji Beda | 31 |
| 3.6.5 | Uji Kelayakan Model | 31 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 33 |
| 4.1 | GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 33 |

| | | |
|-------|---|----|
| 4.2 | ANALISIS DATA..... | 33 |
| 4.3.1 | Analisis Statistik Deskriptif..... | 34 |
| 4.3.2 | Uji Asumsi Klasik | 36 |
| 4.3.3 | Uji Kelayakan Model | 39 |
| 4.3.4 | Uji Regresi..... | 41 |
| 4.3.5 | Uji Hipotesis..... | 42 |
| 4.3 | PEMBAHASAN | 46 |
| 4.4.1 | Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 47 |
| 4.4.2 | Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 48 |
| 4.4.3 | Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 | 49 |
| 4.4.4 | Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 | 50 |
| 4.4.5 | Perbedaan Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19..... | 51 |
| BAB V | PENUTUP..... | 53 |
| 5.1 | KESIMPULAN..... | 53 |
| 5.2 | IMPLIKASI..... | 54 |
| 5.3 | KETERBATASAN PENELITIAN..... | 54 |
| 5.4 | AGENDA PENELITIAN MENDATANG..... | 55 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 56 |
| | LAMPIRAN..... | 59 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Rasio Perhitungan Kinerja Keuangan Pemda | 10 |
| Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu | 14 |
| Tabel 3. 1 Skala Interval Rasio Kemandirian | 29 |
| Tabel 4. 1 Rincian Penyajian Data | 33 |
| Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif | 34 |
| Tabel 4. 3 Kriteria Uji Autokorelasi | 39 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian | 24 |
| Gambar 3. 1 Rumus Rasio Kemandirian | 29 |
| Gambar 3. 2 Rumus Regresi Linear Berganda | 31 |
| Gambar 4. 1 Uji Normalitas | 36 |
| Gambar 4. 2 Uji Multikolinieritas | 37 |
| Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas | 38 |
| Gambar 4. 4 Uji Autokorelasi | 39 |
| Gambar 4. 5 Uji Signifikansi Simultan | 40 |
| Gambar 4. 6 Uji Koefisien Determinasi | 40 |
| Gambar 4. 8 Uji Regresi | 41 |
| Gambar 4. 9 Rumus Regresi Linear Berganda | 41 |
| Gambar 4. 9 Uji Beda Terhadap Pajak Daerah | 44 |
| Gambar 4. 10 Uji Beda Terhadap Retribusi Daerah | 45 |
| Gambar 4. 11 Uji Beda Terhadap Kinerja Keuangan | 46 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tanggal 31 Desember 2019, pandemi Covid-19 awalnya diidentifikasi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok. Tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan wabah ini sebagai pandemi di seluruh dunia, dan tanggal 2 Maret 2020, pasien pertama dilaporkan di Indonesia. Penularan Covid-19 berusaha untuk diminimalisir dengan cara pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia mempublikasikan Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 yang memuat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah daerah dapat memberlakukan PSBB di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan mengajukan usulan kepada Menteri Kesehatan oleh gubernur, bupati, atau wali kota.

Surat Edaran nomor 440/0006405 diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada bulan Maret 2020 tanggal 19 mengenai pencegahan risiko penularan infeksi Covid-19 di wilayah tempat kerja, fasilitas publik, dan transportasi umum di Jawa Tengah. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2020, diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sedikit banyak berdampak pada perolehan PAD Jawa Tengah. Contoh kebijakan kepala daerah yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD yaitu SE Gubernur Jawa Tengah nomor 443.5/0004139 yang menyebutkan bahwa dilakukan

pembatasan sebesar 50% terhadap kegiatan makan ditempat. Selain itu juga terdapat pengurangan menjadi 30% saja bagi kunjungan wisata. Jam operasional kunjungan wisata hanya diperbolehkan sampai pukul 15.00 WIB.

Pembatasan-pembatasan tersebut berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai akibatnya, pendapatan perusahaan dan individu menurun yang pada gilirannya mengurangi potensi penerimaan pajak daerah dari berbagai sumber. Seperti di sektor usaha restoran, hotel, hiburan dan pariwisata. Penerimaan pajak daerah juga semakin turun akibat adanya kebijakan insentif pajak yang diberikan kepada pelaku ekonomi yang terdampak pandemi. Contohnya yaitu kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang memberikan keringanan pajak daerah dalam masa pandemi Covid-19 melalui ditetapkannya SE Walikota bernomor 970/738.1. Adapun jenis pajak yang diberikan dispensasi selama pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu pajak berikut. hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, parkir, air tanah, PBB perdesaan dan perkantoran, serta bea perolehan BPHTB. Studi sebelumnya oleh Nabila & Jannah (2022) berkesimpulan ternyata ada bedanya antara pajak hotel, restoran, hiburan dan hotel sebelum dan pada saat wabah Covid-19. Studi telah dilakukan Syamsul dkk (2022) mendukung kesimpulan tersebut. Menurutnya pajak daerah mengalami perbedaan yang signifikan pada saat Covid-19.

Pembatasan pergerakan dan aktivitas ekonomi yang terjadi selama pandemi Covid-19 juga membuat penurunan aktivitas bisnis dan konsumsi. Hal tersebut berakibat berkurangnya permintaan atas layanan yang biasanya dikenakan retribusi, seperti pariwisata, parkir dan perizinan usaha. Guna menurunkan beban

ekonomi bagi rakyat dan pengusaha yang menerima dampak wabah Covid-19, pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembebasan atau keringana retribusi. Contohnya yaitu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yang membebaskan retribusi daerah bagi pedagang di 27 pasar daerah yang ada melalui Surat Keputusan Bupati Purworejo nomor 160.18/220. Kebijakan tersebut diambil setelah menyaksikan kondisi pasar di wilayah-wilayah semakin sepi akibat pandemi Covid-19. Fenomena penurunan pendapatan retribusi selama pandemi Covid-19 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul dkk (2022), yang menyatakan ada beda pendapatan daerah yang signifikan atas pajak daerah.

Sebagai unsur-unsur PAD, terjadinya penurunan penghasilan daerah dalam pajak dan retribusi pada saat wabah Covid-19 secara langsung berdampak ke penurunan PAD. Tantangan lain dari pandemi Covid-19 yaitu pada dana TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) yang turut dilakukan penyesuaian anggaran dan difokuskan untuk penanganan pandemi. kebijakan dana transfer umum yang ditetapkan pemerintah pusat selama pandemi Covid-19 membuat pendapatan transfer ke daerah menurun juga. Akibatnya presentase PAD tetap lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan transfer. Hal tersebut yang menjadi alasan kenaikan kinerja kemandirian pemerintah dalam keuangan daerah selama wabah Covid-19. Perubahan terhadap pos-pos anggaran yang tidak direncanakan sebelumnya. Menurut Habibi dkk (2021) membuat beda kinerja kemandirian dan solvabilitas keuangan di pemerintah daerah. Sesuai dengan studi dari Syahara & Aufa (2022) yaitu adanya perbedaan pada solvabilitas operasional, kemandirian keuangan, dan fleksibilitas keuangan.

Penghasilan Pajak dan penghasilan retribusi daerah adalah satu dari beberapa asal penghasilan bagi pemerintah daerah. Tingginya penerimaan pajak regional memengaruhi kesanggupan pemerintah di daerah untuk membiayai berbagai program serta layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sedangkan tingkat penerimaan retribusi berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti parkir, pengelolaan limbah, atau perizinan usaha. Pemerintah daerah diberikan otonomi dan kemandirian keuangan oleh pajak dan retribusi daerah guna mendanai aktivitas dan mengelola keuangannya secara mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh Novianti & Apriliawati (2022) yang menyatakan kemandirian keuangan daerah mendapat pengaruh besar dari pajak dan retribusi regional. Hal serupa dijumpai oleh Lukitawati & Pringgabayu (2020) dalam studinya yang menghasilkan kesimpulan yaitu pajak regional dan retribusi regional kepada kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Wiguna & Jati (2019) dalam penelitiannya, bahwa pajak regional dan retribusi regional tidak memiliki pengaruh kepada kemandirian di daerah. Menurut Sumaryanto (2019) retribusi regional tidak memiliki pengaruh kepada kemandirian di daerah sedangkan pajak regional memiliki pengaruh.

Uraian diatas menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan studi dengan berupa kajian hubungan pajak dan retribusi regional terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan melihat perbedaan pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan kemandirian daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. kemudian

dituangkan dalam judul studi **“Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah (Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan melakukan penelitian terkait pengaruh pajak regional dan retribusi regional kepada kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah di masa yang mendatang.

Maka dari itu studi ini hendak menguji beberapa persoalan sebagai berikut:

- 1) Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
- 2) Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
- 3) Apakah terdapat perbedaan pendapatan pajak daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah?
- 4) Apakah terdapat perbedaan pendapatan retribusi daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah?
- 5) Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan diatas antara lain.

- 1) Mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
- 2) Mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
- 3) Mengetahui perbedaan pendapatan pajak daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah
- 4) Mengetahui perbedaan pendapatan retribusi daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah
- 5) Mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Diperkirakan bahwa kesimpulan studi ini akan memajukan ilmu pengetahuan, terutama di bidang bagaimana pajak dan retribusi regional mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Setelah itu, diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah berupa informasi dan wawasan serta menjadi salah satu rujukan atau acuan bagi studi lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

- (1) Perbandingan antara teori dan praktik yang dilakukan dalam studi ini bermaksud untuk memberikan pemahaman dan wawasan.
- (2) Sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

- (3) Diharapkan studi ini mampu menawarkan data yang selanjutnya akan menjadi inspirasi dan evaluasi guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Makalah berjudul “*Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure*” ditulis serta digunakan oleh Jensen & Meckling (1976) dengan tujuan memperkenalkan hukum keagenan. Dimana hukum tersebut memaparkan mengenai relasi keagenan yang terjalin oleh prinsipal dan agen. Dimana prinsipal mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada agen dalam proses pengambilan keputusan. Teori keagenan menekankan pentingnya kontrak atau kesepakatan yang jelas antara agen dan prinsipal. Hal tersebut dimaksudkan agar agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Tidak jarang agen memiliki kepentingan yang berbeda dari prinsipal. Prinsipal dapat menggunakan berbagai mekanisme pengendalian dan pengawasan untuk mengatasi hal tersebut. Seperti pemantauan langsung, penggunaan sistem insentif yang tepat, atau struktur kepemilikan yang memungkinkan prinsipal untuk mengontrol perilaku agen. Dalam hubungan keagenan dapat timbul biaya agensi merupakan sebuah hal yang muncul atas agen dan prinsipal yang memiliki perbedaan kepentingan. Biaya agensi dapat termasuk biaya pemantauan, biaya kontrak, atau biaya insentif.

Menurut Zelmiyati (2016) yang dikutip oleh Karina & Wibowo (2022), dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sektor publik dapat menerapkan teori keagenan. Teori keagenan dalam pemerintah daerah dapat dilihat sebagai

penggambaran hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah selaku prinsipal serta agen. Pemerintah regional selaku agen mempunyai tanggungjawab untuk mengelola anggaran sesuai dengan kepentingan masyarakat selaku prinsipal. Sudut pandang lain dalam menggambarkan teori keagenan dalam pemerintah daerah yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah regional selaku prinsipal serta agen. Pemerintah regional wajib bertanggungjawab atas wewenang yang dialihkan oleh pemerintah pusat.

2.2 VARIABEL PENELITIAN

2.2.1 Kinerja Keuangan

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Dalam kerangka administrasi pemerintahan lokal, keuangan regional mencakup seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban bernilai moneter di wilayah tersebut serta kekayaan apa pun yang mungkin dimiliki oleh daerah sehubungan hak-hak serta kewajiban-kewajiban itu. Batas ruang keuangan regional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2020 Nomor 77, merupakan tanggung jawab daerah untuk mengawasi operasi pemerintah lokal dan menyelesaikan utang dengan pihak ketiga; kekuasaan daerah untuk meminjam uang dan mengumpulkan retribusi daerah serta pajak lokal; pendapatan daerah; belanja daerah; Kekayaan orang lain yang ada di dalam penguasaan pemerintah regional dalam pelaksanaan fungsi dan/atau pelayanan kepentingan umum, dan sumber daya regional yang dalam penguasaan pemerintah regional secara mandiri atau oleh orang lain dalam bentuk kas, sekuritas, piutang, barang, dan hak-hak lain yang memiliki nilai moneter, termasuk kekayaan daerah yang terpisah.

Menurut Halim (2008) dalam menganalisis kinerja finansial pemerintah regional memakai analisis rasio kepada APBD adalah salah satu metode. Rasio-rasio tersebut tersaji melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Rasio Perhitungan Kinerja Keuangan Pemda

| No | Rasio | Pengukuran |
|----|------------------------------|--|
| 1 | Derajat Otonomi Fiskal (DOF) | $\frac{PAD}{Total PD}$ |
| 2 | Rasio Kemandirian | $\frac{PAD}{Pendapatan Transfer}$ |
| 3 | Rasio Efektivitas PAD | $\frac{Realisasi PAD}{Pendapatan Transfer}$ |
| 4 | Rasio Efisiensi | $\frac{Realisasi Belanja Daerah}{Realisasi Pendapatan Daerah}$ |
| 5 | Rasio Keserasian | $\frac{Belanja Operasi}{Realisasi Belanja Daerah}$ |

1) Derajat Otonomi Fiskal

Tingkat otonomi fiskal mengacu pada kapasitas keuangan daerah dan kekuatan untuk menemukan, mengelola, dan menggunakan sumber pendapatan sendiri untuk melaksanakan pemerintahan.

2) Rasio Kemandirian

Rasio ini digunakan Sebagai ukuran tingkat keterlibatan masyarakat pada daerah tertentu dalam upaya peningkatan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. rasio ini digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai operasional mereka.

3) Rasio Efektifitas PAD

Pertanyaan seberapa besar pemerintah dapat mengumpulkan PAD dari potensi target/nyatanya ditunjukkan melalui rasio ini.

4) Rasio Efisiensi

Hubungan antara belanja anggaran dan realisasinya selama tahun fiskal saat ini digambarkan oleh rasio efisiensi.

5) Rasio Keserasian

Rasio ini, yang merupakan rasio antara total pengeluaran tidak langsung dan total pengeluaran langsung, digunakan untuk mengukur seberapa baik realisasi pengeluaran sesuai. Peningkatan alokasi anggaran (prioritas) bagi kegiatan yang relevan dengan program yang dirancang oleh pemerintah daerah ditunjukkan oleh rasio keselarasan yang lebih rendah. Rasio ini seharusnya serendah mungkin. Namun, karena rasio belanja anggaran daerah (APBD) terhadap total belanja signifikan digerakkan oleh dinamika pengembangan dan urgensi investasi bagi infrastruktur ekonomi masyarakat, keduanya sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan. Hingga tahun ini tidak ada skala dalam menentukan kategori keserasian daerah.

2.2.2 Pajak Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menuliskan bahwa pajak regional adalah partisipasi yang diwajibkan bagi wilayah yang harus dibayar individu maupun organisasi berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa tanpa pembayaran langsung. Uang yang terkumpul dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan daerah demi kesejahteraan maksimal masyarakat. Pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi adalah dua kategori pungutan wajib regional. Pajak air permukaan, rokok, bahan bakar kendaraan bermotor, biaya pengalihan nama kendaraan bermotor, dan pajak

kendaraan bermotor adalah contoh pajak provinsi. Pajak bumi dan bangunan, sarang burung walet, penerangan dan hiburan adalah contoh pungutan wajib kabupaten/kota.

Salah satu unsur PAD yaitu pajak regional. Pajak regional disebutkan dalam bagian pendapatan laporan realisasi anggaran dalam LKPD.

2.2.3 Retribusi Daerah

Retribusi regional adalah pungutan lokal yang diwajibkan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan bagi pelayanan dan penerbitan perizinan khusus untuk kepentingan orang atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tahun 2009 nomor 28 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Layanan publik atau jasa umum, layanan komersial atau jasa usaha, dan izin khusus adalah tiga target dari retribusi daerah.

1) Objek Retribusi Jasa Umum

Layanan diberikan oleh pemerintah regional bagi kebutuhan publik, serta dapat dirasakan oleh orang-orang atau organisasi, dikenal sebagai restitusi layanan publik atau retribusi jasa umum. Layanan kesehatan, layanan kebersihan/sampah, biaya penggantian untuk pencetakan kartu identitas dan sertifikat registrasi sipil, layanan pemakaman dan kremasi, layanan pasar, layanan parkir pinggir jalan, uji kendaraan bermotor, inspeksi pemadam kebakaran, adalah beberapa contoh retribusi jasa umum. Objek lain yang termasuk kedalam retribusi jenis ini yaitu biaya penyedotan toilet,

penimbangan ulang, pemeliharaan menara telekomunikasi, dan pengolahan limbah.

2) Objek Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha atau layanan bisnis dapat diartikan layanan yang diberikan oleh pemerintah regional yang mengikuti dasar-dasar komersial. Ini termasuk layanan yang memanfaatkan atau mengoptimalkan kekayaan daerah yang kurang dimanfaatkan serta layanan yang diserahkan oleh pemerintah regional selama sektor swasta tidak dapat menyediakannya dengan cukup. Pemanfaatan kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau toko, situs lelang, terminal, tempat parkir yang ditentukan, hotel, wisma, dan vila, rumah potong hewan, layanan pelabuhan, lapangan olahraga dan rekreasi, penyeberangan air, serta penjualan barang-barang lokal semuanya adalah contoh objek retribusi jasa usaha.

3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi jenis ini ialah layanan memberikan izin khusus yang ditawarkan pemerintah wilayah kabupaten atau kota bagi rakyat pribadi dan organisasi masyarakat dengan tujuan mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya alam, ruang, infrastruktur, fasilitas, atau amenities tertentu untuk menjaga kebutuhan publik dan melindungi keberlanjutan lingkungan. Izin bangunan, penjualan minuman beralkohol, gangguan, rute, dan usaha adalah lima kategori retribusi perizinan khusus.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan atas studi sebelumnya merupakan satu diantara pijakan dalam melaksanakan studi ini sehingga diharapkan membantu mendukung teori yang diterapkan pada model saat ini.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti Tahun | Variabel, Sampel & Teknik Analisis | Hasil |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1 | Pangestu (2023) | <p>Dependen : Kinerja keuangan daerah</p> <p>Independen : 1) Pajak daerah 2) Dana perimbangan 3) PAD 4) Belanja modal</p> <p>Sampel : 33 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara 2018-2020</p> <p>Metode : Analisis regresi linear berganda pada SPSS versi 25</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. • Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. • PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. |
| 2 | Novianti & Aprilia wati (2022) | <p>Dependen : Kemandirian keuangan daerah</p> <p>Independen : 1) Pajak daerah 2) Retribusi daerah</p> <p>Sampel : Kota Tasikmalaya 2016-2020</p> <p>Metode : Analisis deskriptif dan Analisis regresi linear berganda pada SPSS versi 25</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. • Retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. • Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daeran. |

| No | Peneliti Tahun | Variabel, Sampel & Teknik Analisis | Hasil |
|----|---------------------------------|--|--|
| 3 | Lukitawati & Pringgabayu (2020) | <p><u>Dependen :</u> Kemandirian keuangan daerah</p> <p><u>Independen :</u> 1) Pajak daerah 2) Retribusi daerah</p> <p><u>Sampel :</u> Kabupaten XYZ periode 2009-2018</p> <p><u>Metode :</u> Analisis Regresi Linier Berganda pada SPSS</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. • Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. • Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah. |
| 4 | Wiguna & Jati (2019) | <p><u>Dependen :</u> Kinerja keuangan daerah</p> <p><u>Independen :</u> 1) Pajak daerah 2) Retribusi daerah 3) Lain-lain yang sah PAD</p> <p><u>Sampel :</u> Provinsi Bali 2012-2016</p> <p><u>Metode :</u> Regresi linear berganda</p> | <p>Pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</p> |
| 5 | Sumaryanto (2019) | <p><u>Dependen :</u> Kinerja keuangan daerah</p> <p><u>Independen :</u> 1) Pajak daerah 2) Retribusi daerah 3) Dana perimbangan</p> <p><u>Sampel :</u> Seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2017</p> <p><u>Metode :</u> Analisis regresi linear berganda</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. • Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. • Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. |

| No | Peneliti Tahun | Variabel, Sampel & Teknik Analisis | Hasil |
|----|----------------------------|---|--|
| 6 | Rahmawati & Kiswara (2022) | <p><u>Dependen :</u> Kinerja keuangan daerah</p> <p><u>Sampel :</u> 34 Provinsi di Indonesia 2019-2020</p> <p><u>Metode :</u> Uji <i>paired sample test</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perbedaan signifikan sebelum dan semasa Covid-19 mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. • Tidak terjadi perbedaan signifikan mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi daerah pada PAD. |
| 7 | Amal & Wibowo (2022) | <p><u>Dependen :</u> Kinerja keuangan daerah</p> <p><u>Sampel :</u> Provinsi DKI Jakarta</p> <p><u>Metode :</u> Deskriptif kualitatif</p> | Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama seperti rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR. Adapun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi Covid-19. |
| 8 | Karina & Wibowo (2022) | <p><u>Dependen :</u> Kinerja keuangan daerah</p> <p><u>Sampel :</u> Kota Semarang</p> <p><u>Metode :</u> Deskriptif kualitatif</p> | Secara umum kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Semarang sudah cukup baik walaupun pada masa pandemi terjadi penurunan. |
| 9 | Nabila & Jannah (2022) | <p><u>Dependen :</u> Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p><u>Sampel :</u> 45 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa 2018-2021</p> <p><u>Metode :</u> uji <i>Paired Sample T test</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan antara pajak hotel, restoran, hiburan dan hotel kabupaten/kota di pulau jawa sebelum dan selama pandemi Covid-19 • Tidak terdapat perbedaan antara pajak reklame kabupaten/kota di pulau jawa sebelum dan selama pandemi Covid-19 • Kontribusi retribusi daerah terbesar terjadi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2020 |

| No | Peneliti Tahun | Variabel, Sampel & Teknik Analisis | Hasil |
|----|-----------------------|---|---|
| 10 | Syahara & Aufa (2022) | <u>Dependen :</u> Kinerja keuangan daerah <u>Sampel :</u> Seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur (kecuali Kabupaten Jember) | Terdapat perbedaan pada kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. Dan tidak terdapat perbedaan pada solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. |
| 11 | Aji dkk (2023) | <u>Dependen :</u> Pajak Daerah <u>Sampel :</u> Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul <u>Metode :</u> uji <i>Paired Sample T test</i> | Tidak terdapat perbedaan antara efektivitas pajak daerah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. |
| 12 | Syamsu dkk (2022) | <u>Dependen :</u> Pajak dan Retribusi Daerah <u>Sampel :</u> 34 pemerintah provinsi di Indonesia <u>Metode :</u> uji <i>Paired Sample T test</i> | Terdapat perbedaan pendapatan daerah yang signifikan dari pajak dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19. |

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Asumsi berikut dapat dibuat untuk studi ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya:

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Hubungan yang terjalin oleh pemerintah regional dan masyarakat sebagai agen serta prinsipal dijelaskan oleh hukum keagenan. Pemerintah daerah diberdayakan oleh masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan pajak daerah demi kebaikan wilayah dan kesejahteraan terbesar warganya. Untuk dapat membenarkan penggunaan pajak daerah, pemerintah daerah harus menunjukkan keberhasilan finansial yang kuat.

Pemerintah daerah mengandalkan pajak daerah sebagai sumber pendanaan utama mereka. Akibatnya, pendapatan pajak suatu daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik dan inisiatif termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah regional diserahkan kemerdekaan finansial untuk mengelola keuangan mereka sesuai dengan tuntutan masing-masing daerah berkat perpajakan daerah. Inilah alasan mengapa daerah dengan pendapatan pajak tinggi juga melihat peningkatan dalam kondisi keuangan pemerintah daerahnya. Maka dari itu, kinerja pemerintah dalam keuangan daerah dipengaruhi secara positif dari pajak daerah.

Studi yang dilaksanakan oleh Sumaryanto (2019) berkesimpulan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan yang searah terhadap kinerja daerah

dalam keuangan. Dalam kata lain kenaikan penghasilan pajak regional dapat membuat kinerja keuangan pemerintah regional lebih baik. Anggapan ditas didukung dengan hasil studi yang dilakukan oleh Novianti & Apriliawati (2022) yaitu pajak regional memiliki efek besar kepada kemandirian daerah dalam hal keuangan. Lukitawati & Pringgabayu (2020) juga memperoleh hasil yang sama dalam penelitiannya. Hasil penelitian yang sedikit berbeda diperoleh Wiguna & Jati (2019) yang berkesimpulan pajak lokal tidak berefek kepada kinerja daerah dalam hal keuangan. Maka dari itu, dalam studi yang dilakukan perkiraan yang ditawarkan yaitu.

H1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hubungan yang terjalin sebagai agen dan prinsipal oleh pemerintah daerah dan masyarakat dijelaskan oleh teori keagenan. Pajak lokal dibayar oleh masyarakat, yang bertindak sebagai agen, bagi layanan khusus spesifik yang diserahkan oleh pemerintah lokal. Parkir, pengelolaan sampah, dan layanan kesehatan hanyalah beberapa fasilitas dan layanan yang digunakan pemerintah dengan uang dari pajak lokal untuk ditawarkan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah menerima pendapatan tambahan selain pajak berupa retribusi daerah. Pemerintah daerah menciptakan uang retribusi untuk membiayai layanan atau fasilitas tertentu dengan mengenakan tarif retribusi pada layanan dan

fasilitas yang ditawarkannya. Ini memungkinkan layanan publik disediakan oleh pemerintah daerah. Layanan tersebut bersifat lebih sesuai dengan pilihan dan kebutuhan masyarakat daripada hanya bergantung pada pemerintah inti. Maka dari itu, kinerja pemerintah regional dalam hal keuangan berpeluang meningkat apabila pendapatan retribusi daerah meningkat. Artinya retribusi daerah berpotensi menaikkan kinerja pemerintah dalam hal keuangan daerah.

Studi yang dilakukan oleh Novianti & Apriliawati (2022) memperlihatkan bahwasannya retribusi lokal memiliki pengaruh signifikan kepada keuangan daerah dalam kemandirian daerah. Artinya kenaikan retribusi lokal nantinya berakibat pada naiknya kinerja keuangan regional dalam aspek kemandirian. Hal tersebut selaras jika dibandingkan dengan studi yang dilaksanakan oleh Lukitawati & Pringgabayu (2020) yang berkesimpulan retribusi lokal mempunyai efek positif kepada kemandirian daerah. Kesimpulan studi sedikit berbeda diperoleh Wiguna & Jati (2019) berkesimpulan bahwa tidak ada pengaruh retribusi daerah kinerja finansial daerah. Maka, dalam penelitian ini perkiraan yang ditawarkan yaitu.

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal dijelaskan oleh teori agensi. Untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, komunitas memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menggunakan pajak daerah untuk kepentingan regional. Masyarakat

mengharapkan bahwa pemerintah daerah akan menerapkan mekanisme untuk menjaga pendapatan pajak selama wabah COVID-19, mencegah terjadinya penurunan yang terlalu tajam.

Pada saat wabah Covid-19, diberlakukan limitasi aktivitas rakyat untuk mencegah penyebaran wabah. Terbatasnya mobilitas dan interaksi sosial membuat aktivitas ekonomi berjalan dengan lambat. Sebagai akibatnya, pendapatan perusahaan dan individu menurun yang pada gilirannya mengurangi potensi penerimaan pajak daerah dari berbagai sumber. Seperti di sektor usaha restoran, hotel, hiburan dan pariwisata. Sehingga pendapatan pajak daerah lebih tinggi sebelum wabah Covid-19 disandingkan pada saat wabah tersebut terjadi.

Studi yang dilaksanakan oleh Nabila & Jannah (2022) berkesimpulan pajak hotel, restoran, hiburan dan hotel mempunyai perubahan yang besar antara sebelum dan pada saat Covid-19. Pada pajak reklame tidak dijumpai perubahan besar sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Penelitian lain datang dari Syamsul dkk (2022) yang menjumpai beda signifikan pada pendapatan daerah dari pajak regional. Maka, dalam studi ini hipotesis yang dikembangkan tercantum berikut ini.

H3 : Terdapat perbedaan pendapatan pajak daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19

2.4.4 Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Hubungan yang terjalin sebagai agen dan prinsipal oleh pemerintah daerah dan masyarakat dijelaskan oleh teori keagenan. Untuk beberapa layanan yang diberikan oleh pemerintah regional berlaku sebagai agen dan rakyat sebagai

prinsipal, membayar pajak daerah. Masyarakat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan pendapatan regional dari layanan dan fasilitas tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama wabah Covid-19.

Pada masa terjadinya Covid-19, diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah. Pembatasan pergerakan dan aktivitas ekonomi yang terjadi selama pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan aktivitas bisnis dan konsumsi. Hal tersebut berakibat berkurangnya permintaan atas layanan yang biasanya dikenakan retribusi, seperti pariwisata, parkir dan perizinan usaha. Sehingga sebelum wabah Covid-19, pendapatan retribusi daerah lebih tinggi disandingkan saat pandemi Covid-19.

Studi yang dilakukan oleh Syamsul dkk (2022) berkesimpulan terdapat beda signifikan pada pendapatan daerah dari retribusi daerah. Maka, dalam penelitian ini perkiraan yang ditawarkan adalah.

H4 : Terdapat perbedaan pendapatan retribusi daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19

2.4.5 Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan keagenan yang terjalin oleh masyarakat sebagai prinsipal serta pemerintah daerah sebagai agen. Pada saat wabah Covid-19 pemerintah diberikan kewenangan oleh masyarakat untuk mengelola keuangan daerah agar tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kepentingan umum. Pemerintah bertanggungjawab untuk mendanai program-program Kesehatan dan sosial yang diperlukan dalam rangka memberikan respon

terhadap pandemi Covid-19. Contohnya seperti pengadaan alat Kesehatan, fasilitas perawatan Kesehatan tambahan, layanan tes, vaksinasi, serta bagi kalangan masyarakat yang terdampak secara ekonomi diberikan bantuan sosial.

Kegiatan masyarakat dibatasi selama pandemi Covid-19 untuk menghentikan penyebaran wabah. Kegiatan ekonomi melambat akibat terbatasnya mobilitas dan kontak sosial. Oleh karena itu, pendapatan lokal yang berasal dari pajak dan retribusi regional menurun. Namun, pendapatan transfer ke wilayah juga menurun akibat strategi dana transfer umum pemerintah pusat selama pandemi Covid-19. Akibatnya, proporsi PAD tetap lebih besar daripada pendapatan transfer. Ini menjelaskan mengapa kinerja pemerintah daerah dalam hal keuangan selama pandemi Covid-19 meningkatkan kemandirian mereka. Akibatnya, kinerja keuangan pemerintah sebelum Covid-19 lebih buruk dibandingkan pada saat pandemi.

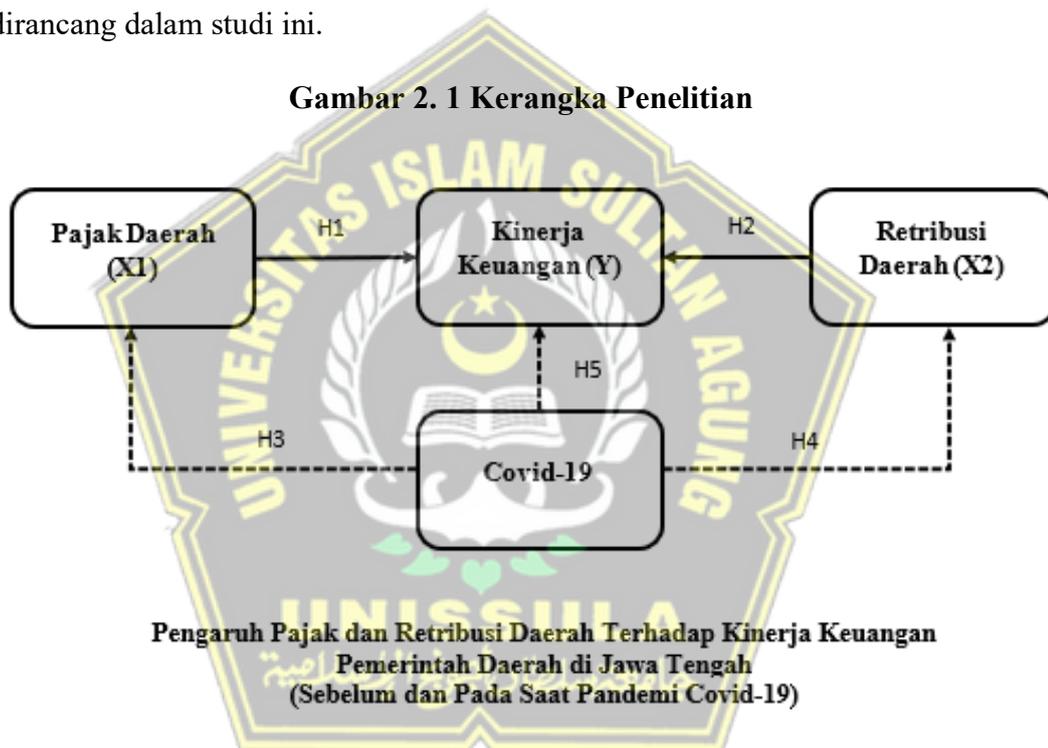
Dilaksanakan studi oleh Habibi dkk (2021) yang menunjukkan ada bedanya kinerja keuangan pemerintah regional dalam rasio kemandirian finansial serta solvabilitas operasional pemerintah. Selaras dengan hasil studi dari Syahara & Aufa (2022) yaitu adanya beda signifikan pada kemandirian finansial, fleksibilitas finansial, dan solvabilitas operasional. Maka, studi ini menawarkan kemungkinan sebagai berikut.

H5 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19

2.5 KERANGKA PENELITIAN

Dalam studi ini, dua kategori variabel dipakai. Pajak dan retribusi regional berfungsi sebagai variabel independen, sedangkan kinerja finansial pemerintah regional berfungsi sebagai variabel terikat. Perbedaan antara pajak lokal, retribusi daerah, dan kinerja finansial pemerintah lokal sebelum dan pada saat wabah Covid-19 juga diteliti dalam studi ini. Grafik ini memperlihatkan kerangka studi yang dirancang dalam studi ini.

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Studi ini memakai cara studi kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), dasar dari metodologi penelitian kuantitatif adalah positivisme. Menurut filosofi positivisme realitas, peristiwa, dan fenomena dapat diamati, diukur, bersifat nyata, umumnya konsisten, dapat diklasifikasikan, dan memiliki hubungan sebab-akibat. Dalam kebanyakan kasus, metode kuantitatif digunakan untuk mempelajari populasi dan sampel yang representatif. Karena sampel dipilih secara acak, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi. Konsep atau teori digunakan sebagai dasar perumusan masalah dalam studi ini, yang mengarah pada hipotesis. Setelah itu, bukti dikumpulkan untuk menguji teori tersebut. Statistik deskriptif atau inferensial kemudian digunakan untuk secara kuantitatif memeriksa data yang dikumpulkan dan menentukan apakah hipotesis didukung atau tidak.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.2.1 Populasi Penelitian

Kategori untuk mengabstraksi yang terdiri dari item atau orang dengan jumlah dan atribut tertentu yang diputuskan peneliti untuk diteliti lalu disimpulkan adalah pengertian populasi (Sugiyono, 2017). Populasi di dalam studi ini ialah

seluruh pemerintah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah total 35 pemerintah kabupaten/kota.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sebagian dari seluruh dan ke-khas-an yang dimiliki oleh populasi tersebut adalah sampel (Sugiyono, 2017). Cara penentuan sampel yang dipakai untuk studi berikut ialah *purposive sampling technique* artinya penentuan sampel dengan penilaian tertentu dengan atribut sebagai berikut:

- (1) Pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Mempublikasikan LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) tahun 2017-2022 secara berturut-turut.

Pemerintah kota diambil sebagai sampel dalam studi ini dengan mempertimbangkan karakteristik atau perbedaan antara pemerintah kota dan kabupaten. Struktur pemerintah kabupaten terdiri dari kecamatan dan desa. Sedangkan pemerintah kota terdiri dari kecamatan dan kelurahan. Adapun desa memperoleh alokasi anggaran khusus berupa dana desa sedangkan kelurahan tidak. Hal tersebut membuat TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) pemerintah kabupaten lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kota. Akibatnya, kinerja finansial pemkot dalam hal kemandirian lebih besar dibanding pemkab.

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA

Secondary data ialah bentuk data yang dipakai dalam studi ini. *Secondary data* diartikan sebagai informasi yang tidak diberikan secara *direct* oleh pemilik data melainkan diperoleh oleh pengumpul data melalui dokumen atau perantara lainnya. (Sugiyono, 2017). Asal data sekunder dalam penelitian ini didapatkan

secara daring pada website djpk.kemenkeu.go.id yaitu berupa LKPD kabupaten/kota.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Cara yang dipakai dalam mengambil data di studi ini adalah dengan melakukan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017) Salah satu cara untuk mengumpulkan data dan informasi dalam berbagai format adalah melalui dokumentasi. Buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan foto yang dikompilasi ke dalam laporan dengan justifikasi yang mendukung kesimpulan adalah beberapa contohnya.

Penelitian ini mengumpulkan data berupa LKPD kota di Provinsi Jawa Tengah dengan mengunduh melalui laman Kementerian Keuangan yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR

3.5.1 Variabel Independen

Istilah variabel bebas mengacu pada faktor-faktor yang berdampak terhadap atau memodifikasi variabel dependen/terikat. (Sugiyono, 2017). Pada Studi ini terdapat dua variabel independen yaitu pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2).

1) Pajak Daerah (X1)

Pajak daerah adalah kontribusi yang diwajibkan kepada wilayah yang harus dibayarkan individu dan organisasi berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa tanpa pembayaran langsung. Uang yang terkumpul dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan daerah demi kesejahteraan

maksimal masyarakat. Salah satu jenis PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah pajak regional. Pajak regional disebutkan dalam bagian pendapatan LRA LKPD kabupaten/kota.

2) Retribusi Daerah (X2)

Biaya lokal yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk kompensasi layanan atau penerbitan izin khusus untuk kepentingan orang atau organisasi dikenal sebagai retribusi daerah. Sebagian dari PAD yaitu retribusi regional. Retribusi daerah didokumentasikan dalam bagian pendapatan LRA LKPD kabupaten/kota.

3.5.2 Variabel Dependen

Sering ditulis sebagai variabel terikat, variabel dependen adalah sebuah hal yang dihasilkan dari atau ditentukan oleh faktor independen. (Sugiyon, 2017). Pada studi ini variabel terikat yang dipergunakan yaitu kinerja pemerintah daerah dalam hal keuangan (Y).

Menurut Halim (2008) terdapat lima rasio perhitungan kinerja pemerintah dalam hal keuangan daerah. Rasio kemandirian akan dipakai dalam studi ini untuk menilai kinerja pemerintah dalam keuangan daerah. Contoh perbandingan yang dipakai guna menilai kapasitas pemerintah regional dalam membiayai operasional mereka adalah *independency ratio*. sebagai ukuran tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pembangunan daerah (Halim, 2008). Rasio kemandirian dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Gambar 3. 1 Rumus Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

Berikut merupakan skala interval rasio kemandirian yang dikembangkan oleh Halim (2008) :

Tabel 3. 1 Skala Interval Rasio Kemandirian

| Kinerja Keuangan | Skala |
|-------------------------|--------------|
| Sangat Rendah | 0 - 25% |
| Rendah | 25 - 50% |
| Sedang | 50 - 75% |
| Tinggi | 75 - 100% |

3.6 METODE ANALISIS DATA

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Guna mencapai kesimpulan yang luas, digunakan salah satu kategori statistik yang mencirikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan disebut statistik deskriptif. (Sugiyono, 2017). Rata-rata, standar deviasi, kemiringan, kurtosis, serta nilai terendah dan tertinggi ditampilkan melalui descriptive statistics.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan model bebas dari masalah heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas, *classical assumption test* dilakukan. *Classical assumption test* dalam penelitian ini meliputi tes normalitas, tes autokorelasi, tes heteroskedastisitas, dan tes multikolinearitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Tes normalitas harus dilakukan di studi ini guna menjamin bahwa data yang dikumpulkan didistribusikan secara normal. Beberapa metode digunakan untuk memastikan apakah data didistribusikan normal, termasuk uji Plot Probabilitas, uji Histogram, dan tes Kolmogorov-Smirnov..

3.6.2.2 Uji Autokorelasi

Untuk mengidentifikasi residual yang berkaitan dengan periode sebelumnya, uji autokorelasi harus dilakukan dalam penelitian ini. Jika residual dari model regresi tidak berkorelasi di seluruh data, model dianggap sangat baik..

3.6.2.3 Uji Multikolinearitas

Untuk menyelidiki potensi korelasi antara variabel independen, uji multikolinearitas harus dilakukan.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menentukan seberapa konsisten varians residual di seluruh observasi, uji heteroskedastisitas harus dilakukan dalam studi ini. Uji Park, uji scatter plot, dan uji Glejser adalah contoh-contoh cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan uji ini.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Studi ini memakai *multiple linear regression test* untuk memeriksa bagaimana pajak dan retribusi daerah memengaruhi kinerja keuangan. Bentuk umum persamaan ini yaitu:

Gambar 3. 2 Rumus Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Y | = Kinerja keuangan pemerintah daerah |
| α | = Konstanta |
| β_1, β_2 | = Koefisien regresi |
| X1 | = Pajak Daerah |
| X2 | = Retribusi Daerah |
| e | = Error |

3.6.4 Uji Beda

Jika data terdistribusi normal, uji T sampel berpasangan akan menjadi uji perbedaan yang diberlakukan dalam studi ini. Tujuan dari uji beda ini adalah guna mengidentifikasi dan menjabarkan variasi perbedaan dalam rata-rata dan sampel yang dipasangkan atau terkait.

3.6.5 Uji Kelayakan Model

3.6.5.1 Uji R^2

Untuk menentukan seberapa banyak variabel independen dapat menjelaskan variabel terikat, uji koefisien determinasi, juga dikenal sebagai kuadrat R yang disesuaikan digunakan.

3.6.5.2 Uji F

Guna menjawab pertanyaan apakah setiap variabel bebas mempunyai efek bersamaan pada *dependent variable*, uji F dipakai. Menurut kriteria uji F, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa *independent variable* mempunyai efek bersamaan yang signifikan pada *dependent variable* apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih rendah dari 0,05 dan hasil perhitungan f lebih dari tabel f.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah pulau Jawa. Ada 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan di Jawa Tengah, yang berisi 35 kabupaten/kota. 29 diantaranya adalah kabupaten dan 6 lainnya kota. (BPS, 2024). Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017–2022 menjadi objek studi. Cara penentuan sampel yang dipakai untuk studi berikut ialah *purposive sampling technique* artinya penentuan sampel dengan penilaian tertentu dengan atribut yang telah diuraikan pada bab tiga. Asal data sekunder dalam penelitian ini didapatkan secara daring pada website djpk.kemenkeu.go.id yaitu berupa LKPD kabupaten/kota. Berikut rincian penyajian data:

Tabel 4. 1 Rincian Penyajian Data

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| Data yang terhimpun | 36 | 100% |
| Data yang tidak sesuai kriteria | 0 | 0% |
| Data yang dapat diolah | 36 | 100% |

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

4.2 ANALISIS DATA

Studi ini memakai software SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) dalam menganalisis data. Proses analisis data yang dilalui adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji regresi, dan uji hipotesis.

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Jumlah data, nilai terendah dan tertinggi, nilai rata-rata, dan standar deviasi semuanya ditentukan menggunakan analisis statistik deskriptif. Temuan hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini meliputi:

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Dev |
|-----------------------|----|---------|----------|----------|-----------|
| Pajak Daerah (X1) | 36 | 31,21 | 1.956,23 | 348,8397 | 536,91743 |
| Retribusi Daerah (X2) | 36 | 5,32 | 113,68 | 34,7597 | 33,62501 |
| Kinerja Keuangan (Y) | 36 | 0,29 | 1,38 | 0,5661 | 0,29637 |
| Valid N | 36 | | | | |

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Pajak daerah dengan nilai terendah sebesar Rp 31,21 Milyar adalah Kota Magelang tahun anggaran 2017. Sedangkan nilai maksimal pajak daerah sebesar Rp 1.956,23 Milyar adalah Kota Semarang tahun anggaran 2022. Rendahnya pendapatan pajak daerah Kota Magelang apabila disandingkan dengan kota-kota lain yang berada di Jawa Tengah sejalan dengan rendahnya jumlah penduduk yaitu 130.324 jiwa dari data yang dipublikasikan oleh BPS. Jumlah tersebut jauh dibawah jumlah penduduk di Kota Semarang yaitu 1.653.524 jiwa yang adalah kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata realisasi pajak daerah pada tahun anggaran 2017-2022 adalah sebesar Rp 348,8397 Milyar sedangkan simpangan bakunya yaitu Rp 536,91 Milyar. Simpangan baku yang diperoleh lebih tinggi dari rata-rata artinya pajak daerah di Jawa Tengah menghasilkan pajak daerah yang beragam selama tahun 2017 sampai dengan 2022.

Retribusi daerah dengan nilai terendah yaitu sebesar Rp 5,32 Milyar adalah Kota Magelang tahun anggaran 2020. Sedangkan nilai maksimal retribusi daerah sebesar Rp 113,68 Milyar adalah Kota Semarang tahun anggaran 2019. Kota Semarang mempunyai penghasilan retribusi yang paling tinggi di Jawa Tengah dimungkinkan karena jumlah fasilitas publik, pariwisata, dan sumber retribusi lebih tinggi mengingat luas wilayahnya merupakan yang terluas di Jawa Tengah. Luas Kota Semarang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 373,7 km², berbanding terbalik dengan Kota Magelang yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 18,1 km². Rata-rata realisasi retribusi daerah pada tahun 2017-2022 adalah sebesar Rp 34,76 Milyar sedangkan simpangan bakunya yaitu Rp 33,625 Milyar. Simpangan baku retribusi daerah lebih rendah dibandingkan rata-ratanya, artinya retribusi daerah di Jawa Tengah tidak terlalu beragam pada tahun 2017 sampai dengan 2022.

Kinerja pemerintah dalam keuangan daerah diproksikan dengan rasio kemandirian, yang merupakan perbandingan antara PAD dan pendapatan transfer. Dengan nilai terendah sebesar 0,29 adalah Kota Pekalongan tahun anggaran 2018. Sedangkan nilai tertinggi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 1,38 adalah Kota Semarang tahun anggaran 2022. Kota Pekalongan memiliki rasio kemandirian terendah dibandingkan kota lain di Provinsi Jawa Tengah artinya PAD dibandingkan pendapatan transfernya relatif rendah. Kota Semarang memiliki rata-rata rasio kemandirian diatas 100% yang artinya bahwa PAD di Kota Semarang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pendapatan transfernya. Rata-rata kemandirian daerah pada tahun 2017-2022 adalah 0,5661. Menurut Halim rasio kemandirian daerah dengan rentan 50%-75% termasuk dalam kategori sedang.

Sedangkan simpangan bakunya yaitu sebesar 0,296, lebih rendah dari rata-rata. Artinya kinerja keuangan pemerintah lokal di Jawa Tengah tidak begitu beragam.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Kolmogrov Smirnov digunakan untuk melakukan uji normalitas ini menggunakan kriteria nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*. Data dianggap terdistribusi normal karena nilainya lebih tinggi dari 0,05. Berikut adalah hasil tes multikolinieritas yang dilaksanakan melalui peneitian ini:

Gambar 4. 1 Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual | |
|--|-------------------------|-------------------------|------|
| N | | 36 | |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 | |
| | Std. Deviation | .08380648 | |
| Most Extreme Differences | Absolute | .130 | |
| | Positive | .130 | |
| | Negative | -.088 | |
| Test Statistic | | .130 | |
| Asymp. Sig. (2-tailed) ^c | | .130 | |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d | Sig. | .127 | |
| | 99% Confidence Interval | Lower Bound | .118 |
| | | Upper Bound | .136 |

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Terlihat hasil tes diatas dapat menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah senilai 0,130. Sehingga kesimpulannya adalah data telah terdistribusi secara normal.

4.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Tes Multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah terdapat interaksi antar variabel bebas pada model regresi. Jika nilai *Tolerance* $> 0,100$ dan VIF (*Variance Inflation Factor*) $< 10,00$ maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Dibawah ini adalah hasil tes multikolinieritas yang dilaksanakan dalam studi ini:

Gambar 4. 2 Uji Multikolinieritas

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | Beta | t | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .419 | .024 | | 17.150 | <.001 | | |
| | Pajak Daerah | .001 | .000 | 1.222 | 8.941 | <.001 | .130 | 7.708 |
| | Retribusi Daerah | -.003 | .001 | -.288 | -2.105 | .043 | .130 | 7.708 |

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk seluruh variabel independen lebih besar dari 0,100 yaitu nilai *tolerance* dari variabel pajak daerah adalah 0,130 dan variabel retribusi daerah sebesar 0,130. Selain itu juga dapat diketahui bahwa nilai VIF dari seluruh variabel independen tidak melebihi 10,00 yaitu variabel pajak daerah sebesar 7,708 dan variabel retribusi daerah sebesar 7,708. Gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terdapat pada studi ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tes Heteroskedastisitas yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji *park*. Kriteria yang dipakai pada tes ini adalah jika nilai

signifikansi lebih tinggi dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan data yang digunakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Dibawah ini merupakan hasil tes heteroskedastisitas yang telah dilaksanakan dalam studi ini:

Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -5.783 | .578 | | -10.008 | <.001 |
| | Pajak Daerah | .003 | .002 | .763 | 1.648 | .109 |
| | Retribusi Daerah | -.048 | .028 | -.788 | -1.701 | .098 |

a. Dependent Variable: LN_RES

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada seluruh variabel independen. Variabel pajak daerah memiliki nilai signifikansi 0,109 sedangkan variabel retribusi daerah memperoleh nilai signifikansi 0,098. Sehingga dapat digambarkan bahwa data tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson*. Dalam Penelitian ini menggunakan nilai α yaitu 5%, data sebanyak 36 dan 2 variabel independen. Sehingga nilai DL adalah 1,3537 dan nilai DU adalah 1,5872. Kriteria pengujiannya dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 3 Kriteria Uji Autokorelasi

| | |
|--|----------------------------|
| $D < -DL$ atau $D > 4 \cdot DL$ | Terjadi Autokorelasi |
| $DU < D < 4 \cdot DU$ | Tidak Terjadi Autokorelasi |
| $DL < D < DU$ atau $4 \cdot DU < D < 4 \cdot DL$ | Tidak Ada Kesimpulan |

Setelah dilakukan uji autokorelasi dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 4. 4 Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .959 ^a | .920 | .915 | .08631 | 1.621 |
| a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah | | | | | |
| b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan | | | | | |

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* yaitu sebesar 1,621. Nilai tersebut memenuhi kriteria $DU < D < 4 \cdot DU$ yaitu $1,5872 < 1,621 < (4 \cdot 1,5872)$. Artinya studi ini tidak terdapat autokorelasi.

4.3.3 Uji Kelayakan Model

4.3.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tes signifikansi simultan berfungsi untuk melihat apakah seluruh variabel independent dalam studi ini memberikan dampak atau pengaruh secara simultan kepada variabel terikat. Setelah dilakukan uji F, didapati nilai tes sebagai berikut:

Gambar 4. 5 Uji Signifikansi Simultan

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|---------|--------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 2.828 | 2 | 1.414 | 189.848 | <.001 ^b |
| | Residual | .246 | 33 | .007 | | |
| | Total | 3.074 | 35 | | | |

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dari hasil uji F diatas, diperoleh nilai signifikansi $<0,001$ yang artinya kurang dari 0,05. Selain itu nilai F hitung yaitu 189,848 lebih besar dari F tabel yaitu 3,28 ($n=36, k=3, \alpha=0,005$). Arti dari hal tersebut adalah bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah dalam keuangan daerah.

4.3.3.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Tujuan dari uji koefisien determinasi adalah untuk menentukan seberapa baik model dapat memperhitungkan varians variabel terikat. Nilai R^2 yang disesuaikan berfungsi sebagai koefisien penentuan dalam tes ini. Setelah uji koefisien determinasi penelitian ini, dicapai hasil dibawah:

Gambar 4. 6 Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .959 ^a | .920 | .915 | .08631 |

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dari hasil uji diatas, diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,915 (91,5%), yang artinya model penelitian ini dapat menjelaskan sebesar 91,5% variasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal kemandirian. Selebihnya sebesar 8,5% variasi dijabarkan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.3.4 Uji Regresi

Studi ini memakai tes regresi linear berganda untuk melihat interaksi antara beberapa variabel independen dengan variabel terikat. Dari tes yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 4. 7 Uji Regresi

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .419 | .024 | | 17.150 | <.001 |
| | Pajak Daerah | .001 | .000 | 1.222 | 8.941 | <.001 |
| | Retribusi Daerah | -.003 | .001 | -.288 | -2.105 | .043 |

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil tes regresi linear berganda yang telah disajikan pada gambar diatas, persamaan regresi dari studi ini yaitu:

Gambar 4. 8 Rumus Regresi Linear Berganda

$$Y = 0,419 + 0,001 X_1 - 0,003 X_2 + e$$

- a. Jika semua faktor, termasuk pajak dan pungutan daerah, adalah nol, maka nilai tetap 0,419 dapat dipahami sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah berada pada tingkat kinerja 0,419, atau 41,9%.
- b. Koefisien pajak daerah (X1) memiliki nilai 0,001. Menurut interpretasi ini, jika pajak daerah naik Rp 1 miliar, kinerja keuangan pemerintah daerah akan membaik sebesar 0,1%, asalkan semua faktor lainnya tetap sama.
- c. Koefisien retribusi regional (X2) memiliki nilai -0,003. Hal ini mengindikasikan, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap sama, kenaikan retribusi daerah sebesar Rp 1 miliar justru akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,3%.

4.3.5 Uji Hipotesis

Studi ini menggunakan dua metode untuk menguji hipotesis yaitu uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik T) dan uji beda. Untuk setiap variabel dalam penelitian ini, ambang batas signifikansi ditetapkan pada 0,05 ($\alpha = 5\%$). Uji T digunakan dalam proses analitik dengan syarat bahwa variabel independen memiliki dampak yang signifikan pada variabel dependen jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya, jika hasil perhitungan $t >$ tabel t untuk perhitungan t positif, dapat dikatakan bahwa variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Mengenai t negatif, dapat disimpulkan dari tabel $<$ hitungan -t bahwa variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Dalam melakukan uji beda, uji-T sampel berpasangan adalah uji alternatif yang akan digunakan dalam penyelidikan ini. Untuk menentukan dan

menjelaskan perbedaan antara rata-rata dan sampel terkait atau berpasangan, uji perbedaan digunakan. Terdapat perbedaan yang signifikan jika nilai *sig. (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05, dan tidak ada perbedaan yang signifikan jika nilai *sig. (2-tailed)* lebih tinggi dari 0,05. Setelah melakukan uji hipotesis, diperoleh hasil sebagai berikut:

4.3.5.1 Hasil Uji Hipotesis 1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai *t* yang dihitung sebesar 8,941 untuk variabel independen pajak daerah lebih tinggi dari tabel *t* sebesar 1,692. Selanjutnya, nilai signifikan 0,001 ditemukan pada variabel pajak, yang kurang dari batas signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh perpajakan daerah. H1 yang beranggapan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima.

4.3.5.2 Hasil Uji Hipotesis 2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai *t* yang dihitung dari -2.105 untuk variabel independen retribusi regional kurang dari nilai -*t* tabel -1.692. Selanjutnya, ditemukan nilai signifikan 0,043 untuk variabel retribusi regional, yang kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh retribusi daerah dengan arah negatif. H2 yang beranggapan

Telah dilakukan Uji-T sampel berpasangan terhadap realisasi pendapatan retribusi daerah sebelum (2017-2019) dan selama wabah Covid-19 (2020-2022), diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 4. 10 Uji Beda Terhadap Retribusi Daerah

| | | Paired Differences | | 95% Confidence Interval of the Difference | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|--------|--|--------------------|----------------|---|---------|------|----|-----------------|
| | | Mean | Std. Deviation | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 | Retribusi sebelum covid19 - Retribusi saat covid19 | 1.16167 | 6.29815 | -1.97033 | 4.29366 | .783 | 17 | .445 |

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dari hasil uji yang telah dilakukan diatas, diperoleh hasil *sig. (2-tailed)* senilai 0,445 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan realisasi pendapatan retribusi daerah sebelum dan selama wabah Covid-19 perbedaan yang signifikan tidak dijumpai. H4 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendapatan retribusi daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 ditolak.

4.3.5.5 Hasil Uji Hipotesis 5. Perbedaan Pendapatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Telah dilakukan Uji-T sampel berpasangan terhadap kinerja pemerintah dalam keuangan daerah sebelum (2017-2019) dan selama wabah Covid-19 (2020-2022), diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 4. 11 Uji Beda Terhadap Kinerja Keuangan

| | | Paired Samples Test | | | | | | | |
|--------|--|---------------------|----------------|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|
| | | Paired Differences | | 95% Confidence Interval of the Difference | | t | df | Sig. (2-tailed) | |
| | | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | Lower | | | | Upper |
| Pair 1 | kinerja keuangan sebelum covid19 - kinerja keuangan saat covid19 | -.09000 | .10041 | .02367 | -.13993 | -.04007 | -3.803 | 17 | .001 |

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dari hasil uji yang telah dilakukan diatas, diperoleh hasil *sig. (2-tailed)* senilai 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 terdapat perbedaan yang signifikan. H₅ yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 diterima.

4.3 PEMBAHASAN

Pemerintah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara pemerintahan di ranah regional berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mendukung visi dan misi walikota/bupati maupun gubernur. Salah satu kinerja yang krusial bagi pemerintah daerah adalah kinerja keuangannya. Studi ini berfungsi untuk menguji secara empiris pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah apakah terdapat pengaruh dari pendekatan level kemandirian daerah. Untuk memahami lebih dalam bagaimana pengaruhnya, hasil penelitian yang telah dilakukan tersaji dibawah ini:

4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan uji hipotesis dalam studi ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 8,941 untuk variabel independen pajak daerah lebih tinggi dari tabel t sebesar 1,692. Selanjutnya, nilai signifikan 0,001 ditemukan pada variabel pajak, yang kurang dari batas signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 0,05. Selain itu, koefisien pajak daerah positif sebesar 0,001 diperoleh dari uji regresi. Menurut apa yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H_1 diterima. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika jumlah penerimaan pajak di daerah mengalami penurunan, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih sulit, dan sebaliknya.

Pemerintah daerah mengandalkan pajak daerah sebagai sumber pendanaan utama mereka. Akibatnya, pendapatan pajak suatu daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik dan inisiatif termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah regional diserahkan kemerdekaan finansial untuk mengelola keuangan mereka sesuai dengan tuntutan masing-masing daerah berkat perpajakan daerah. Inilah alasan mengapa daerah dengan pendapatan pajak tinggi juga melihat peningkatan dalam kondisi keuangan pemerintah daerahnya. Maka dari itu, kinerja pemerintah dalam keuangan daerah dipengaruhi secara positif dari pajak daerah.

Hasil studi ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh R. Novianti & Aprilawati (2022) studi ini menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah

dipengaruhi secara signifikan oleh perpajakan daerah. Hal ini dimungkinkan karena salah satu komponen utama PAD adalah pendapatan pajak daerah, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak juga akan berdampak pada pertumbuhan PAD. Karena banyaknya jumlah PAD, suatu wilayah dapat membayar pengeluaran regionalnya sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

4.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel independen retribusi regional memiliki nilai t yang dihitung $-2,105$, yang kurang dari nilai $-t$ tabel sebesar $-1,692$. Selanjutnya, ditemukan nilai signifikan $0,043$ untuk variabel retribusi regional, yang kurang dari tingkat signifikansi $0,05$. Koefisien retribusi regional, seperti yang ditentukan oleh uji regresi linier, negatif, pada $-0,003$. Oleh sebab itu diketahui bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terbalik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal keuangan, sehingga H_2 ditolak. Kesimpulan tersebut dapat dimaknai apabila pendapatan retribusi daerah tinggi justru berpengaruh terhadap penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya.

Di Provinsi Jawa Tengah sendiri pendapatan retribusi hanya menyumbang sebagian kecil dari PAD pada tahun 2017-2022 yaitu rata-rata Rp 34,7597 milyar per tahun. Jumlah tersebut jauh dibawah pendapatan pajak yang memiliki rata-rata tahun 2017-2022 yaitu Rp 348,8397 milyar per tahun.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh D. Novianti & Ishak (2022) bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian daerah. Menurut penelitian tersebut hal ini disebabkan karena retribusi daerah hanya menyumbang PAD dalam jumlah yang tidak signifikan. Selain itu daerah dengan retribusi daerah yang tinggi cenderung tidak memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah dari aspek yang lain sehingga PAD tidak berkembang dan kemandirian daerah yang rendah.

4.4.3 Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Hasil tes perbedaan yang dilakukan dengan *paired sample T-test* diperoleh hasil *sig. (2-tailed)* senilai 0,061 lebih besar dari 0,05. Dapat diartikan realisasi pendapatan pajak daerah sebelum dan selama wabah Covid-19 tidak dijumpai perbedaan yang signifikan, sehingga H₃ ditolak.

Hasil diatas selaras dengan studi yang dilaksanakan oleh Aji dkk (2023), berkesimpulan bahwa pajak daerah sebelum dan selama wabah Covid-19 relatif sama. Menurut penelitian tersebut nilai penurunan penghasilan pajak daerah yang berpengaruh hanya ada pada jenis pajak yang menggunakan system *self assessment*. Artinya jenis-jenis pajak dimana wajib pajak perlu melaksanakan perhitungan, membuat laporan, dan penyetoran mandiri, contohnya seperti pajak hotel, pajak restoran, dan hiburan. Sedangkan pajak-pajak daerah lainnya dimana sektor tersebut tidak terdampak pandemi Covid-19 cenderung konstan atau tetap. Pajak daerah lain seperti pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak terpengaruh secara signifikan.

Pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah juga menerapkan kebijakan keringanan pajak untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penurunan pajak selama wabah Covid-19. Contohnya yaitu kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang memberikan keringanan pajak daerah dalam masa pandemi Covid-19 melalui ditetapkannya Surat Edaran Wali Kota nomor 970/738.1. Adapun jenis pajak yang diberikan dispensasi selama pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, PBB perdesaan dan perkantoran, serta bea perolehan BPHTB.

4.4.4 Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Hasil tes perbedaan yang dilakukan dengan uji T berpasangan diperoleh perhitungan *sig. (2-tailed)* senilai 0,445 lebih besar dari 0,05. Artinya, realisasi pendapatan retribusi daerah sebelum dan selama wabah Covid-19 tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga H4 ditolak.

Hasil studi ini sejalan dengan studi yang dilaksanakan oleh Rahmawati & Kiswara (2022) yang berkesimpulan bahwa kontribusi retribusi daerah sebelum dan selama wabah Covid-19 sama atau tidak mengalami perubahan. Pemerintah daerah kebanyakan memberikan relaksasi atau penyesuaian tarif retribusi selama wabah Covid-19. Hal tersebut dilaksanakan dengan maksud masyarakat tetap

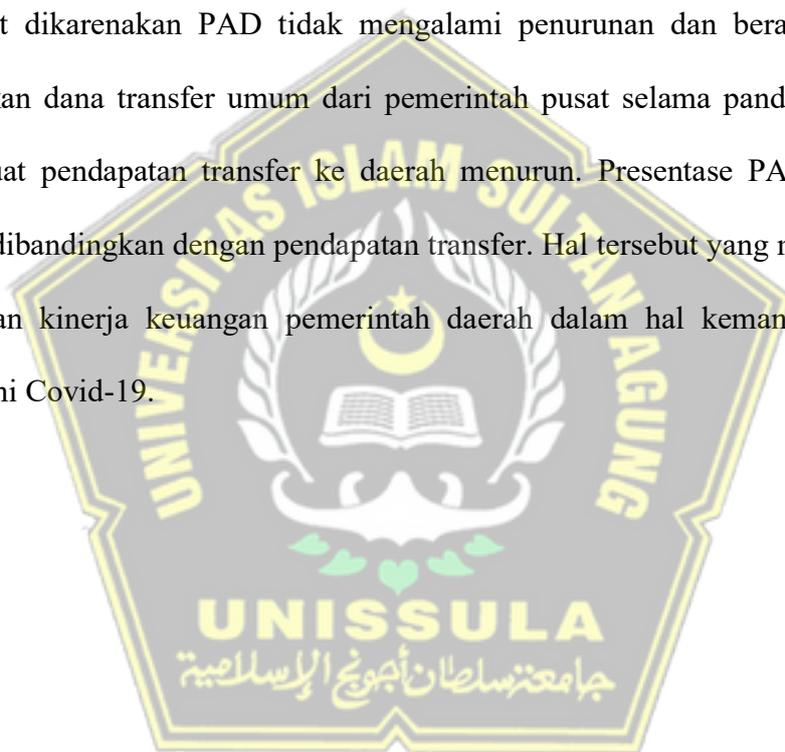
menggunakan layanan retribusi selama pandemi Covid-19. Meskipun terjadi penurunan tarif, namun jumlah pengguna fasilitas umum tetap stabil sehingga dampak penurunan pendapatan retribusi daerah tidak terasa terlalu signifikan. Contohnya yaitu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Purworejo yang membebaskan retribusi daerah bagi pedagang di 27 (dua puluh tujuh) pasar daerahnya.

4.4.5 Perbedaan Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19

Hasil tes perbedaan yang dilakukan dengan uji T berpasangan diperoleh perhitungan *sig. (2-tailed)* senilai 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama wabah Covid-19 ditemukan perbedaan yang signifikan, sehingga H5 diterima.

Kegiatan masyarakat dibatasi selama pandemi Covid-19 untuk menghentikan penyebaran wabah. Kegiatan ekonomi melambat akibat terbatasnya mobilitas dan kontak sosial. Oleh karena itu, pendapatan lokal yang berasal dari pajak dan retribusi regional menurun. Namun, pendapatan transfer ke wilayah juga menurun akibat strategi dana transfer umum pemerintah pusat selama pandemi Covid-19. Akibatnya, proporsi PAD tetap lebih besar daripada pendapatan transfer. Ini menjelaskan mengapa kinerja pemerintah daerah dalam hal keuangan selama pandemi Covid-19 meningkatkan kemandirian mereka. Akibatnya, kinerja keuangan pemerintah sebelum Covid-19 lebih buruk dibandingkan pada saat pandemi.

Hasil studi tersebut sesuai dengan studi yang dilaksanakan oleh Habibi dkk (2021) yaitu tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama wabah covid-19 terdapat perbedaan yang signifikan. Rata-rata rasio kemandirian kota di Jawa Tengah sebelum wabah Covid-19 yaitu 0,52 sedangkan pada saat Covid-19 yaitu 0,61. Kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah justru mengalami kenaikan yang signifikan selama pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan PAD tidak mengalami penurunan dan berarti sedangkan kebijakan dana transfer umum dari pemerintah pusat selama pandemi Covid-19 membuat pendapatan transfer ke daerah menurun. Presentase PAD tetap lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan transfer. Hal tersebut yang menjadi alasan kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal kemandirian selama pandemi Covid-19.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dalam studi yang dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan yang akan diuraikan dibawah ini. Setelah dilakukan uji linear berganda dan uji beda terhadap pajak daerah, retribusi daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2022 seperti uraian diatas, diperoleh hasil bahwa:

1. Di Provinsi Jawa Tengah, kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota meningkat secara signifikan oleh perpajakan daerah. Ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah akan melakukan lebih baik secara finansial jika pengumpulan pajak daerah meningkat.
2. Di Provinsi Jawa Tengah, kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota dipengaruhi secara negatif oleh retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah justru menurun seiring dengan meningkatnya penerimaan retribusi daerah.
3. Di Provinsi Jawa Tengah, penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota sebelum dan selama wabah Covid 19 tidak banyak berubah..
4. Penerimaan retribusi daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah tidak berubah secara signifikan sebelum atau selama wabah Covid 19.
5. Kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah wabah Covid 19 berbeda secara signifikan..

Selain itu, analisis ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah secara kombinasi secara signifikan berdampak pada keberhasilan keuangan pemerintah daerah.

5.2 IMPLIKASI

Mengingat hasil analisis, pembahasan, serta kesimpulan yang disebutkan diatas, maka studi ini mungkin memberikan beberapa implikasi antara lain :

- 1) Bagi penelitian selanjutnya
 - (1) Diharapkan bahwa studi ke depan akan dapat menggunakan berbagai objek dari berbagai wilayah Indonesia.
 - (2) Diperkirakan bahwa lebih banyak variabel akan ditambahkan dalam studi mendatang untuk membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal independensi.
- 2) Bagi pemerintah

Studi ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan, rekomendasi, dan koreksi oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, untuk membuat rencana dan kebijakan yang akan meningkatkan kinerja keuangannya dalam hal kemandirian.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementrian Keuangan tidak berupa nominal lengkap. Melainkan hasil pembulatan dalam milyar rupiah. sehingga temuan ini tidak secara akurat mencerminkan keadaan aktual kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.4 AGENDA PENELITIAN MENDATANG

Penelitian ini beserta keterbatasannya agar dapat dijadikan awalan bagi penelitian selanjutnya. Dimana pada penelitian yang akan datang diharapkan terdapat pengembangan variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu penulis juga berharap pada penelitian yang akan datang dilakukan perluasan sampel penelitian hingga menjangkau seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Primastiwi, A., & Widiyanto, K. S. N. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pajak Daerah: Studi Kasus Pemkab Gunungkidul. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1147–1154. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2614>
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, Vol.4, 83–93.
- Habibi, K. A., Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1), 122–147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: managerial behavior agency costs and ownership structure*.
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 360/3 tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Desease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah*. (n.d.).
- Lukitawati, L. J., & Pringgabayu, D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.57084/jata.v1i2.424>

- Nabila, N., & Jannah, L. (2022). ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBANDINGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, 1(1), 121–135.
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250.
<https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Novianti, R., & Apriliawati, Y. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 196–206.
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080–1088.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.* (n.d.).
- Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). Dampak COVID-19 Terhadap kesehatan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sumaryanto, R. P. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2017. *Eprints.Uad*.
[https://eprints.uad.ac.id/15156/1/NASKAH_PUBLIKASI_\(6\).pdf](https://eprints.uad.ac.id/15156/1/NASKAH_PUBLIKASI_(6).pdf)

Syahara, B. Q., & Aufa, M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 27–38.
<https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4017>

Syamsul, Nuelahlah, & Nurhadi. (2022). Krisis Pandemi Covid-19: Dampaknya Pada Pendapatan Daerah dari Sektor Perpajakan dan Retribusi. *Keunis*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.32497/keunis.10i2.3293>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).

Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.28(1 Juli 2019), 85–108.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p04>

